



PUTUSAN
Nomor 529/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1660/PJ/2021, tanggal 15 Maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT JALAN TOL SEKSI EMPAT, beralamat di Gedung Menara Bosowa Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman No. 5, Makassar, yang diwakili oleh Haji Anwar Toha, SE, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yulianto Guritno, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008450.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Mulia dapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga pajak yang kurang dibayar seharusnya menjadi nihil sesuai perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	-
	b. Penyerahan yg PPN-nya hrs dipungut sendiri	47.500.000,00
	c. Jumlah	47.500.000,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yg hrs dibayar sendiri	4.750.000,00
	b. Dikurangi :	
	b.1. Pajak Masukan yg dpt diperhitungkan	3.850.424.219,00
	c. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(3.845.674.219,00)
3	Kelebihan pajak yg sdh dikompensasikan	3.845.674.219,00
4	PPN Kurang Bayar	-
5	Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
6	Jumlah PPN yg msh harus dibayar	-

Tabel Perhitungan PPN Masa Pajak April 2016 Menurut Pemohon Banding

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008450.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00061/KEB/WPJ.15/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00188/207/16/804/18 tanggal 21 Desember 2018 Masa Pajak April 2016, atas nama PT Jalan Tol Seksi Empat, NPWP 02.469.972.0-805.000, dengan alamat di Gedung Menara Bosowa Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman No. 5, Makassar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	47.500.000
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	4.750.000
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	3.850.424.219
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(3.845.674.219)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan	Rp	3.845.674.219
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp	0
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008450.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008450.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00061/KEB/WPJ.15/2019 tanggal 24 Juli 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00188/207/16/804/18 tanggal 21 Desember 2018 Masa Pajak April 2016, atas nama PT Jalan Tol Seksi Empat, NPWP 02.469.972.0-805.000 dengan alamat di Gedung Menara Bosowa Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman No.5, Makassar, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00188/207/16/804/18 tanggal 21 Desember 2018 Masa Pajak April 2016, atas nama PT Jalan Tol Seksi Empat, NPWP 02.469.972.0-805.000 dengan alamat di Gedung Menara Bosowa Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman No.5, Makassar, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2022



3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00061/KEB/WPJ.15/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00188/207/16/804/18 tanggal 21 Desember 2018 Masa Pajak April 2016, atas nama PT Jalan Tol Seksi Empat, NPWP 02.469.972.0-805.000, dengan alamat di Gedung Menara Bosowa Lantai 4, Jalan Jend. Sudirman No. 5, Makassar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	47.500.000
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	4.750.000
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	3.850.424.219
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(3.845.674.219)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan	Rp	3.845.674.219
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp	0
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak



nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp62.678.257,00; dan Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp62.678.257,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp62.678.257,00; dan Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp62.678.257,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya karena *in casu* Termohon Peninjauan Kembali merupakan konsumen akhir atas Pajak Masukan yang telah dibayarkan terkait biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan tol. Oleh karena itu, Pajak Masukan tersebut menjadi komponen

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya atau Harga Pokok Pembelian dari pembuatan Jembatan Tallo II, pembangunan *frontage road* dan pemeliharaan jalan tol lainnya. Hal ini selaras dengan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU PPN;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menyimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali telah tepat dan sesuai karena telah didasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

Bahwa terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak April 2016 sebesar Rp62.678.257,00 telah tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bahwa sehingga seharusnya tidak terdapat kelebihan bayar sebesar Rp62.678.257,00 yang dapat dikompensasikan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), ayat (4) Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, Bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor PUT-008450.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008450.16/2019/PP/M.IIB Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT JALAN TOL SEKSI EMPAT**;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 529/B/PK/Pjk/2022